



## Penanganan Covid-19, tak Ambil Dana Mami dan SPPD?

Amurang, KOMENTAR

Sejak diperintahkan APBD 2020 wajib digeser untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemkab Minsel telah melakukan empat kali pergeseran. Dari Rp 19 miliar yang digeser, Rp 13 miliar sudah habis dipergunakan. Mirisnya pergeseran hanya berlaku di Dinas Kesehatan, Sosial dan Kesbangpol. Sedangkan dana makan minum (Mami) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) justru tidak terkorek.

"Saya sempat heran saat diberikan data pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19. Saya menilai di dalamnya tidak ada semangat untuk mengatasi wabah dan membantu masyarakat terdampak. Apa sebab? Ini karena pergeseran justru hanya ada di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Bapeltbang. Ada juga diambil dari dana hibah yang informasinya diperuntukkan bagi beasiswa atau program CEP. Nah lebih parahnya lagi dana Mami dan perjalan dinas justru tidak terkorek, baik di Sekretariat Pemkab maupun dinas lainnya. Ini jelas sudah menentang surat dari Kemendagri," ujar ketua Fraksi

Primanas Jaclyn Koloay saat dikonfirmasi Senin (27/04) seuai RDP dengan BPMPD.

Lanjut dia juga mengaku heran tidak ada anggaran proyek fisik di Dinas PU dan lainnya digeser untuk penanganan Covid-19. Baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID). Padahal menurutnya anggaran tersebut sebaiknya dipergunakan untuk penanganan Covid-19. "Paling utama selain kesehatan adalah jaminan hidup bagi masyarakat atau jaring sosial. Masakan daerah lain bisa makanya sampai ratusan miliar sedangkan di Minsel tidak," tekannya.

Koloay juga menanggapi diperuntukkan anggaran sebesar Rp 6 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sebanyak lima ribu unit dan operasional. Katanya APD diperuntukkan bagi Fasilitas Kesehatan (Faskes) seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Selain itu juga pos-pos penjagaan di perbatasan. Padahal di Faskes sudah ada APD yang diambil dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

"APD sebanyak lima ribu lebih itu untuk apa? Sebab di Faskes kan sudah ada yang diadakan melalui dana Dinkes dan Puskesmas, kah aneh juga kalau pengadaan APD diserahkan ke BPBD. Apalagi jumlahnya fantastis mencapai Rp 6 miliar. Kami akan mengusut penggunaannya dan siap meneruskan ke penegak hukum. Selain itu juga akan kami



bawa saat penyampaian LKPJ tahunan dan lima tahunan," tegas Koloay yang mengaku geram.

Dia juga menambahkan sangat heran dengan penggunaan dana Rp 13 miliar yang sangat cepat habis. "Luar biasa penyerapan anggaran di masa wabah. Tidak sampai dua bulan sudah habis terpakai. Belum lagi dengan tidak relanya Bupati memangkas Mami dan perjalanan dinas. Jadi jelas sekali, sebenarnya tidak ada pergeseran dan sensasional. Jadi ini akan menjadi bahan bagi kami, tunggu saja," pungkasnya.<sup>(vtr)</sup>